

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)

Alfiani Rahmah¹⁾, M. Rasuli²⁾, Supriono²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: alfianirahmah4@gmail.com

The Effect of Public Accountability, Financial Report Transparency, Organizational Commitment and Human Resources Quality on Village Financial Management (An Empirical Study on Villages in Concong District, Kempas District and Keritang District, Indragiri Hilir Regency)

ABSTRACT

This study aim to examine and to analyze the effect of public accountability, financial report transparency, organizational commitment and the quality of human resources on village financial management. The public accountability variable uses five indicators, namely legal accountability, process accountability, program accountability, policy accountability and financial accountability. The variable of financial report transparency uses four indicators, namely planning, implementation, supervision and accountability. The variable of organizational commitment uses three indicators, namely affective, sustainability and normative. The variable of human resource quality uses three indicators, namely knowledge, skills and attitudes. Meanwhile, the village financial management variable uses five indicators, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research includes quantitative research. The total population in this study were 128 village officials in the villages of Concong, Kempas and Keritang, Indragiri Hilir Regency. The sampling technique used was purposive sampling. Data measurement scale with Likert scale. The hypothesis were examined with multiple regression analysis approach and the statistical program used was SPSS 25. The results of this study indicate that public accountability, financial report transparency, organizational commitment and the quality of human resources have a direct and significant effect on village financial management.

Keywords: Village Financial Management, Public Accountability, Transparency of Financial Statement, Organizational Commitment and Quality of Human Resources.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk kemajuan suatu desa.

Dengan adanya pemberian wewenang kepada desa untuk dapat mengurus urusan pemerintahannya sendiri, maka diikuti pula dengan semakin besarnya tanggung jawab pemerintah desa untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya. Untuk tercapainya tujuan atau terwujudnya kepentingan masyarakat di sebuah desa, Pemerintah setempat perlu untuk melakukan strategi saat melaksanakan kegiatan, salah satunya dalam mengelola keuangan desa harus dengan sewajarnya, sehingga dapat memenuhi hak dan kewajiban masyarakat yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Di samping itu Permendagri No 20 Tahun 2018 mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah pusat membuat kebijakan bantuan dana yang berasal dari APBN yaitu kebijakan Dana Desa. Kebijakan dana desa bertujuan untuk mewujudkan tekad pemerintah dalam mempercepat pembangunan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya Indonesia melalui daerah pinggiran dan desa. pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pemberian dana desa yang dimulai sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 Pemerintah Pusat memberikan dana senilai 20,7 Triliyun

yang diperuntukkan kepada 74.903 Desa, dan meningkat ditahun 2016 menjadi 46,9 Triliyun yang digelontorkan kepada 74.754 Desa kemudian pada Tahun 2017 ditingkatkan lagi menjadi 60 Triliyun (*kemenkeu.go.id*). Dengan terus meningkatnya jumlah dana desa tersebut artinya pemerintah desa harus dapat melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan data yang dirilis oleh peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 181 kasus penyelewengan keuangan desa selama tahun 2015-2018 di Indonesia. Dari banyaknya jumlah penyelewengan tersebut ICW menyebutkan ada 5 titik rawan terdapat proses pengelolaan keuangan desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, dan pengadaan barang atau jasa dalam penyaluran pengelolaan keuangan desa (*kompas.com*).

Hasil survei Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya permasalahan dalam praktik pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, yaitu: masih terdapatnya desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, terdapat dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDes. Tahap pelaksanaan, yaitu desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan. Serta kekayaan milik desa dan proporsi penggunaan dana alokasi dana desa belum sesuai ketentuan yaitu 30% untuk operasional dan 70% untuk pembangunan atau pemberdayaan. Tahap penatausahaan dan pelaporan yaitu masih terdapat desa yang belum akuntabilitas dalam menyusun laporan sesuai dengan ketentuan. Tahap

pertanggungjawaban yaitu belum didukungnya kesiapan aparat kecamatan saat evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan oleh AKBP Christian Rony Putra Sik MH selaku Kepolisian Polres Indragiri Hilir dan AKP Syafri Joni SE tahun 2018 selaku Kasubag Humas menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan di Desa Panglima Raja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana anggaran pembangunan desa pada APBDesa Panglima Raja Kec. Concong Kab. Inhil – Riau Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Kades dan Sekdes tidak sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa yang telah di koordinasi bersama aparatur pemerintahan desa lainnya, anggaran atau dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tidak digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa. Kades dan sekdes tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran pembangunan desa pada APBDesa Panglima Raja dan tidak bisa menunjukkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau sebesar Rp. 309.589.335 (tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Permasalahan diatas menjelaskan adanya indikasi terjadinya masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku mengenai desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan yang

berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Sehingga, semakin baik akuntabilitas publik yang dilaksanakan oleh perangkat desa, maka dapat mengindikasikan pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Umami (2017) menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah transparansi laporan keuangan. Transparansi laporan keuangan merujuk pada ketersediaan informasi kepada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah. Sehingga, ketika segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kebijakan desa tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum, maka dapat mengindikasikan pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri (2017) menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor ketiga yang juga mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah Komitmen Organisasi. Apabila aparatur pemerintah desa memiliki komitmen yang tinggi di dalam organisasi, maka hal ini akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerja yang akan berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang baik. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi pemerintah desa, maka pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dikelola dan diatur dengan baik, sehingga dapat menimbulkan peran aktif

dari pegawai untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien. Ketika kualitas sumber daya manusia di suatu organisasi semakin baik, maka para anggotanya akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, membantu mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri anggota organisasi lainnya. Sehingga, kinerja dari masing-masing anggotanya menghasilkan kinerja yang memuaskan dan mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2016) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 1) pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa; 2) pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa; 3) pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa; dan 4) pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 Ayat (2-3), yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan- aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai

dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Transparansi Laporan Keuangan

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009:18), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Komitmen Organisasi

Robbins dan Judge (2009:101) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Menurut Wibowo (2017: 430), di dalam komitmen organisasi terkandung tiga unsur, yaitu (1) identifikasi, perasaan individu menjadi bagian dari organisasi (2) pelibatan yang artinya bahwa individu merasa terlibat dalam proses pelaksanaan organisasi dan (3) loyalitas yang memiliki arti bahwa individu loyal terhadap organisasi. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Pasolong (2013:5) kualitas sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan berdampak pada kestabilan instansi pemerintah dan upaya pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah itu sendiri, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan modal yang mampu berperan aktif dan positif dalam proses bekerja.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran.

Oleh sebab itu, dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkannya akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan hasil

pencapaian yang telah dilakukan dalam desa tersebut. Akuntabilitas sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat desa. Penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut akan dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum. Ketika akuntabilitas publik di suatu instansi baik, maka hal ini juga dapat mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

H₁: Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa berarti pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Prinsip transparansi ini penting agar keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, oleh sebab itu pemerintah desa harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya mengenai pengelolaan keuangan desa. Sehingga, semakin transparan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka akan mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih baik pula.

H₂: Transparansi Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Robbins dan Judge (2009:101) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Apabila seorang individu memiliki komitmen dalam mencapai tujuan organisasi, maka hal ini dapat mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerjanya.

Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi, komitmen orang-orang di dalam organisasi menjadi sangat penting. Jika seorang individu komitmen dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi kinerjanya (Gamaliel, 2017). Semakin baik komitmen organisasi pegawai dari suatu perangkat desa, maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan desa

H₃: Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Matindas (2002:94) kualitas sumber daya manusia adalah kesanggupan tiap-tiap karyawan baik didalam menyelesaikan pekerjaannya, mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya.

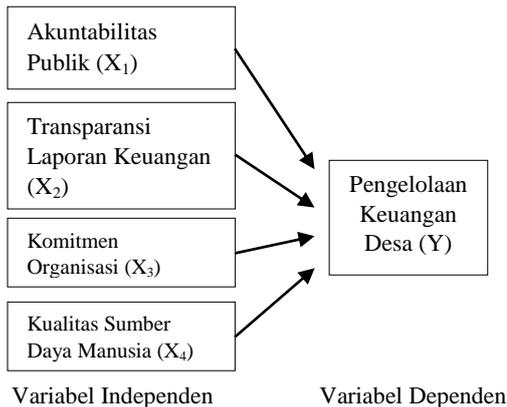
Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa maka harus memiliki sumber daya manusia yang terampil serta yang berpengalaman dalam mengelola laporan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus memiliki sumber daya manusia yang mampu dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu pemerintah desa,

maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa tersebut pula.

H₄: Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Model Penelitian

Gambar 1
Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 32 desa. Teknik *sampling* dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan adalah kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), sekretaris desa dan kepala urusan keuangan desa. Peneliti menetapkan 4 (empat) responden untuk tiap desa. Sehingga total sampel 128 responden (32 desa x 4 responden).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh langsung dari objek penelitian melalui kuisisioner yang dibagikan kepada objek penelitian. Jenis skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan kuisisioner adalah skala likert. Skor yang digunakan yaitu 1 s/d 5 yaitu 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Netral (N), 4) Setuju (S), 5) Sangat Setuju (SS).

Definisi Variabel dan Pengukuran Akuntabilitas Publik (X₁)

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengukuran variabel akuntabilitas publik ini bersumber dari Mardiasmo (2009) yang diukur dengan indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan.

Transparansi Laporan Keuangan (X₂)

Menurut Mardiasmo, transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa berarti pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku.

Pengukuran variabel transparansi laporan keuangan ini bersumber dari penelitian Gayatri (2017) yang diukur dengan indikator kemudahan akses informasi, penyediaan informasi yang jelas, meningkatkan arus informasi dan menyusun suatu mekanisme pengaduan.

Komitmen Organisasi (X₃)

Robbins dan Judge (2009:101) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Pengukuran variabel komitmen organisasi ini bersumber dari Robbins dan Judge (2009) yang diukur dengan

indikator afektif, keberlanjutan dan normatif.

Kualitas Sumber Daya Manusia (X₄)

Menurut Pasolong (2013:5) mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi.

Pengukuran variabel kualitas sumber daya manusia ini bersumber dari penelitian Edison (2016) yang diukur dengan indikator pengetahuan, keterampilan dan pendidikan.

Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengukuran variabel pengelolaan keuangan desa ini diukur dengan indikator yang bersumber dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai data variabel yang digunakan dalam penelitian, antara lain *mean*, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	St. Dev
Akuntabilitas Publik	116	30,00	50,00	43,02	3,93
Transparansi Laporan Keuangan	116	31,00	45,00	38,46	2,65
Komitmen Organisasi	116	20,00	45,00	38,85	3,56
Kualitas Sumber Daya Manusia					
Pengelolaan Keuangan Desa	116	20,00	40,00	34,44	3,05

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Data yang signifikan dapat dilihat dari tanda bintang yang terdapat pada angka *Pearson Correlation* pada setiap indikator, di mana angka tersebut signifikan pada level 0,01 atau 0,05.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa seluruh butir pertanyaan dalam kuisisioner penelitian ini telah memiliki nilai signifikansi 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga, hasil ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan telah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach alpha* (α) dengan syarat minimum 0,60.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	(α)
Akuntabilitas Publik (X1)	0,670
Transparansi Laporan Keuangan (X2)	0,611
Komitmen Organisasi (X3)	0,625
Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)	0,685
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,697

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah menunjukkan nilai *cronbach's alpha* (α) lebih besar dari 0,60. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua instrument dalam penelitian ini telah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2014).

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
X1	0,789	1,267
X2	0,910	1,099
X3	0,953	1,049
X4	0,777	1,287

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai *tolerance* ≥ 0.10 dan nilai *VIF* ≤ 10 . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah bebas dari multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2014). Penelitian ini menggunakan metode uji park.

Tabel 4 Hasil Uji Park

Model	Unstzd. Coeff.		Stzd. Coeff.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
LnX1	8,412	7,345	0,480	1,145	0,255
LnX2	2,855	11,164	0,103	0,256	0,799
LnX3	-7,720	7,535	-0,425	-1,025	0,308
LnX4	-0,274	11,152	-0,010	-0,025	0,980

Dependent Variabel: LnRES

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan hasil uji park di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel independent dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas

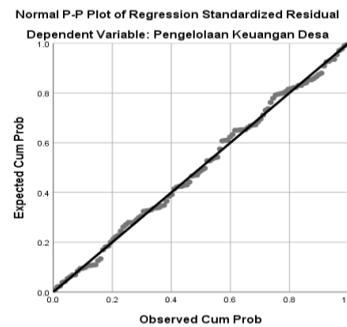
Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan *Normal Probability Plot*.

Tabel 5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Unstandardized Residual		
N		116
Normal	Mean	0,0000000
Paramaters	Std. Dev.	2,23750126
Most Extreme	Absolute	0,046
Differences	Positive	0,042
	Negative	-0,046
Test Statistic		0,046
Asymp. Sig (2-tailed)		0,200

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Gambar 2 Hasil Normal Probability Plot



Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* di atas, diketahui bahwa nilai *asymp. sig. (2-tailed)* adalah 0,200 dan telah lebih besar dari 0,05. Kemudian, berdasarkan grafik *normal probability plot* diketahui bahwa titik-titik data telah mengikuti dan menyebar searah garis diagonal. Dengan demikian, data dalam model regresi penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi

Model	Unstzd. Coeff.		Stzd. Coeff.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,085	4,029		3,496	0,001
Akuntabilitas Publik	0,371	0,077	0,383	4,840	0,000
Transaparansi Laporan Keuangan	0,336	0,101	0,245	3,329	0,001
Komitmen Organisasi	0,231	0,082	0,202	2,810	0,006
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,189	0,078	0,193	2,427	0,017

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi penelitian sebagai berikut:

$$Y=14,08+0,371X_1+0,336X_2+0,23X_3+0,189X_4+0$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 7 Hasil Koefisien Determinasi

R	R^2	Adj. R^2	Std. Error
0,672	0,452	0,432	2,277

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R^2 dalam penelitian ini adalah 0,452. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia dalam menjelaskan variabel pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 45,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Hasil Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Uji Statistik F

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	475.04	4	118.762	22.89	.000 ^b
Residual	575.73	111	5.187		
Total	1050.78	115			

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari model regresi adalah sebesar 0,000. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji regresi parsial (uji t) bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Pengaruh Akuntabilitas Publik (X_1) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variabel	Beta (B)	t hitung	Sig.	Alpha (α)	Hasil
Akuntabilitas Publik	0,383	4,840	0,000	0,05	Diterima

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien regresi (B) sebesar 0,383. Berdasarkan kriteria, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan akuntabilitas yang merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan hasil kerjanya. Akuntabilitas sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat desa. Sehingga, ketika akuntabilitas publik telah dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa baik dalam prosesnya maupun *outcome* yang dicapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umami (2017) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan (X_2) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis Kedua

Variabel	Beta (B)	t hitung	Sig.	Alpha (α)	Hasil
Transparansi Laporan Keuangan	0,245	3,329	0,001	0,05	Diterima

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien regresi (B) sebesar 0,245. Berdasarkan kriteria, dapat disimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, oleh sebab itu pemerintah desa harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya mengenai pengelolaan keuangan desa untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan. Sehingga, ketika transparansi dalam pelaporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kualitas pengelolaan keuangan desa akan turut meningkat baik dalam segi proses pengelolaannya maupun *outcome* yang dicapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gayatri (2017) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi (X₃) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 11 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel	Beta (B)	t hitung	Sig.	Alpha (α)	Hasil
Komitmen Organisasi	0,202	2,810	0,006	0,05	Diterima

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien regresi (B) sebesar 0,202. Berdasarkan kriteria, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi (X₃) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Perangkat desa yang memiliki komitmen dengan sasaran tertentu di tempatnya bekerja, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan

mempengaruhi konsekuensi kinerjanya dalam proses pengelolaan keuangan desa dan memberikan *output* sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X₄) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 12 Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel	Beta (B)	t hitung	Sig.	Alpha (α)	Hasil
Komitmen Organisasi	0,193	2,427	0,017	0,05	Diterima

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien regresi (B) sebesar 0,193. Berdasarkan kriteria, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sumber daya manusia harus dikelola dan diatur dengan baik untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien. Semakin baik kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa tersebut, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2016) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas publik terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Transparansi laporan keuangan terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Komitmen organisasi terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
4. Kualitas sumber daya manusia terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya antara lain:

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian ini dan responden meminta kuisisioner untuk ditinggalkan, sehingga penulis tidak dapat mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.
2. Hasil penelitian ini hanya dapat digeneralisasi pada pengelolaan keuangan desa pada perangkat desa di seluruh desa di Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas, dan Kecamatan Keritang di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga tidak dapat digeneralisasi pada perangkat desa selain dari kecamatan tersebut.

Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya, dapat menggabungkan metode wawancara pada saat mengumpulkan data melalui kuisisioner. Sehingga, peneliti akan dapat memahami masalah kompleksitas masalah dan menjelaskan maksud penelitian kepada responden.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mungkin lebih menjelaskan variabel pengelolaan keuangan desa atau

menambahkan variabel moderasi atau mediasi.

3. Bagi perangkat desa Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Keritang di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu literatur dan sumber informasi dalam rangka evaluasi terutama mengenai bagaimana akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan, komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia telah dilaksanakan di organisasinya masing-masing guna meningkatkan pengelolaan keuangan desa.
4. Bagi regulator, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur atau bahan pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan, maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan objek dan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, Dinar Aji. 2016. "Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa" *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Christian Rony Putra Sik MH, Syafri Joni SE. 2018. *Tersangka Korupsi, Mantan Kades dan Sekdes Panglima Raja di Inhil di Tahan Polisi*. <https://www.ranahriau.com/berita-7665-tersangka-korupsi-mantan-dan-sekdes-panglima-raja-inhil-di-tahan-polisi.html>. Diunggah pada 6 November 2018.

Delviyanti Manopo. 2016. "Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa". *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 4 No.10, hlm 127-138.

- Edison, Emron., Yohny Anwar., dan Imas Komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Egi Primayogha. 2018. *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-18kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>. Diunggah pada 21 November 2018.
- Ekasari, Sugiarti. 2017. “Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran*. ISSN 2252-3936, hlm 580-590.
- Fitra, Amanda Aidil. 2016. “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa (Studi pada Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Gamaliel, Hendrik. 2017. “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”*. Vol.8 No.2, hlm 106-115.
- Gayatri, dkk. 2017. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan”. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2, hlm 175-182.
- Ghozali, Imam. 2014, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, edisi 7*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanifah, Suci Indah. 2015. “Aplikasi dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa”. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 4 No.8, hlm 684-691.
- Ismail, Muhammad. 2016. “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret*. Vol. 19 No.2, hlm 323-340.
- Juanita, Astri. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamagu Selatan”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Kamaroesid, Herry. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Mitra Wacana Media: Jakarta Edisi Pertama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khilmiyah, Isniatul. 2016. “Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.5 No.12, hlm 1-19.
- Ladapse, Maria. 2019. “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur dan Komitmen Organisasi Terhadap

- Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Lubis, Arfan Iksan. 2017. *Akuntansi Keprilakuan*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta Selatan
- Lubis, Herman. Ika Sasti, Ferina, dan Burhanudin, 2016. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hilir)”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Matindas, Rudolf Wennemar. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan Dan Usaha*. Jakarta: Edisi II, Grafiti.
- Medianti, Larastika. 2018. “Pengaruh Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*. Vol.1 No.1, hlm 1-13.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10 No.2, hlm 273-288.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Perdana, Wahyu. 2018. “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ramli, Mustazir. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe”. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10 No. 1, hlm 19-30.
- Robbins, Stephen P, dan Timothy A Judge. 2009. *Perilaku Organisasi* Buku 1 Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosyidi, Muhammad. 2018. “Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*. Vol.1 No.1, hlm 1-14.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sangki, dkk. 2017. “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tanduk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)”. *Jurnal Eksekutif*. Vol.1 No.1, hlm 1-12.

- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Kelima, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soleh dan Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyani. A. T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Gava Media
- Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Umami, Risyah. 2017. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pangelolaan Keuangan Desa”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi*. Vol. 6 No.11, hlm 74-80.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- www.djpk.kemenkeu.go.id
- www.bpkp.go.id
- www.bps.go.id